



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM FAUZI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 203651

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 597.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/29 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/65 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
3. Tanah Seluas 124 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 304.000.000

1. MOTOR, YAMAHA FAZZIO NEO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS XPANDER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 143.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 181.248.048

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.225.698.048

III. HUTANG Rp. 236.151.453

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 989.546.595

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.